

**STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
**(Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang
Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)**

SKRIPSI



OLEH:

ILMA FITRIANA
NIM: 2822123015

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

**STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
**(Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang
Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung Untuk Memenuhi salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Syari'ah (S. Sy.)



OLEH:

ILMA FITRIANA
NIM: 2822123015

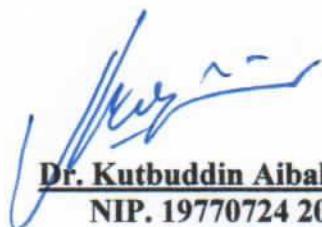
**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Batas Usia Kecakapan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)” yang ditulis oleh Ilma Fitriana NIM. 2822123015 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 01 Juli 2016

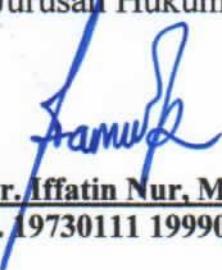
Pembimbing,



Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I.
NIP. 19770724 200312 1 006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. Iffatin Nur, M. Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Tinjauan Pasal 330 KUHP Perdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang
Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)**

SKRIPSI
Disusun oleh

**ILMA FITRIANA
NIM. 2822123015**

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal Juli 2016 dan telah
dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata
satu Sarjana Syari'ah (S. Sy.)

Dewan Penguji

Ketua Penguji :

Indri Hadisiswati, S. H., M. H.
NIP. 19650126 199903 2 001

Tanda Tangan

.....

Penguji Utama :

H. M. Darin Alif Muallifin, S. H., M. Hum.
NIP. 19641105 200112 1 001.

.....

Sekretaris / Penguji :

Dr. Kutbuddin Aibak, S. Ag., M.H.I.
NIP. 19770724 200312 1 006.

.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M. Ag.
NIP. 19750903 200312 1 0

MOTTO

رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّبَىٰ حَتَّىٰ يَحْتَمِ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ

“Diangkat pembeban hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”
(H.R. Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan Al-Daruquthni
dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib).¹

¹ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bab man la yaqo' thalaquhu min al-azwaj juz II*, (t.t., t.p., t. th.), hal. 124

PERSEMPAHAN

Teriring rasa terimakasih, skripsi ini kupersembahkan untuk Ibundaku tercinta, Ibu Rodliyah yang telah mengandung, melahirkan dan merawatku dengan penuh cinta kasih.

Ayahandaku, Bapak Mushonif yang telah mendidikku, bekerja keras untuk mencukupiku, dan mengajariku artinya semangat pantang menyerah.

Mertuaku Bapak Mukhtar dan Ibu Miskiyah yang telah menyayangiku sebagaimana layaknya anak kandung.

Imamku, Mas Nanang Kusairi. Suami yang memiliki kelapangan hati luar biasa. Yang merelakan sebagian waktu dari haknya kubagi untuk berjuang mencari Ilmu. Tetaplah menjadi penyeimbangku. Semoga karena Ilmu kau dan aku dapat bersatu di "Jannah" Nya.

Adikku. Alfi Khariska. Berjuang denganmu 4 tahun di IAIN Tulungagung membuatku sadar bahwa kau adalah tanganku untuk meraba saat mataku tak bisa melihat. Melengkapi dalam kekuranganku.

All Friends in IAIN Tulungagung. Khususnya jurusan Hukum Keluarga angkatan 2012 yang selama 4 tahun ini telah berbagi suka dan duka. saling memotivasi untuk yang lebih baik.

Ukhti ku semua di PONPES Mau'nah Sari Kediri. Vina, Ririn, Cususiyah, Hanif. Bagian dari perjalanan hidupku yang tidak akan pernah kulupakan.

"Anak buah pak huri". Kak Septi, Kak Vika, Kak Lutfi, Kak Erlin, Nduk Vira, Nduk Dewi, Nduk Nopi, Nduk Sari, Nduk Alvi. Yang membuat hidupku dirumah orang terasa bagaikan dirumah sendiri.

Almamaterku. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. teriring ucapan **الحمد لله** atas segala karuniaNya yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang melalui agama Islam.

Sehubungan dengan selesainya penulisan laporan akhir ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Bapak Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I. sebagai pembimbing yang telah membimbing serta memberikan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing serta memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapkan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 22 Juni 2016

Penulis

Ilma Fitriana

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xiv
Daftar Tabel	xxi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penegasan Istilah.....	8
1. Penegasan Konseptual	8
2. Penegasan Operasional	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Pendekatan	10

2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Penyajian dan Analisa Data	13
G. Kajian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : CAKAP HUKUM, HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM

A. Definisi Cakap Hukum	18
B. Pengertian Hukum Positif.....	23
1. Sumber Hukum Positif.....	24
2. Unsur, Ciri-Ciri, dan Sifat Hukum Positif	33
C. Definisi Hukum Islam.....	36
1. Sumber Hukum Islam	37
2. Karakteristik Hukum Islam.....	41

BAB : III BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF

A. Syarat dan Prosedur Cakap Hukum	50
1. Kecakapan Bertindak dan Tindakan Hukum	50
2. Dasar Kecakapan Bertindak.....	51
B. Reasoning Cakap Hukum di Indonesia.....	52
C. Ketentuan Cakap Hukum Dalam Beberapa Substansi Hukum Positif	54
1. Pasal 33o KUHPerdata	54

2. Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	55
3. Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak	56
4. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	56
D. Relevansi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Hukum Positif	53
1. Akibat Pluralitas Kecakapan Hukum Dalam Hukum Positif	54
2. Hukum Dalam Teks dan Hukum Dalam Kenyataan.....	57
3. Analisis Metode Hakim Dalam Penerapan Konsep Kecakapan Hukum Berdasarkan Usia	73

BAB IV : BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Cakap Hukum dalam Hukum Islam	76
B. Periode Penentuan Aqil Baligh dalam Hukum Islam	77
C. Kriteria Cakap Hukum (Aqil Baligh) Perspektif Madzhabul Arba'ah	82
D. Implementasi Aqil Baligh dalam Hukum Islam	86
1. Ketentuan Batas Usia Cakap Dalam Munakahat	88
2. Implementasi Cakap Hukum Dalam Muamalah Perspektif Ulama'	91
3. Implementasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Jinayah (Pidana Islam)	92
4. Persaksian Anak Pra Baligh Dalam Ketentuan Jinayah (Pidana Islam)	93

**BAB V : KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Persamaan.....	96
B. Perbedaan	99

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	107

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)” ini ditulis oleh Ilma Fitriana, NIM. 2822123015, pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, M. H. I.

Kata Kunci: Komparasi, Batas Usia, Cakap Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan hukum yang tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum menjadi sendi yang vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat agar hak antara orang yang satu dan yang lain dapat saling dilindungi. Hukum sebagai jembatan untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan disiplin, pada praktiknya memiliki konsepsi. Diantara konsepsi hukum yang ada, konsepsi hukum positif dan hukum islam merupakan dua bentuk hukum yang memiliki eksistensi lebih di Indonesia dibandingkan konsepsi hukum yang lain. Dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam, keduanya memiliki aturan untuk menentuan kriteria usia seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum, yang disebut dengan kecakapan hukum. Dengan latar belakang tersebut, peneliti membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dalam menentukan batas usia kecakapan hukum seseorang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana batas usia cakap hukum perspektif hukum positif? (2) Bagaimana batas usia kecakapan hukum perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam? adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia cakap hukum baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam dan mengetahui persamaan juga perbedaannya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif, penganalisaan data juga dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis-deskriptif yang bertolak dari analisa yuridis yang ditunjang dengan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aturan batas usia cakap hukum dalam hukum positif memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan kualifikasi usia seseorang dianggap telah dewasa atau cakap hukum antara substansi hukum yang satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain, penentuan batas usia cakap hukum dalam hukum positif belum memiliki keseragaman. Kemudian, karena ketidakseragaman ketentuan batas usia cakap hukum tersebut dapat mengindikasikan terjadinya konflik hukum apabila ketentuan aturan batas usia cakap hukum dalam satu substansi hukum bertemu dengan aturan cakap hukum dari substansi hukum lainnya. (2) dalam penentuan batas usia cakap hukum, hukum Islam memiliki ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan

telah mencapai *ijma'* Ulama', yaitu seseorang dikatakan telah cakap hukum atau dalam istilah fiqh disebut *baligh* apabila telah *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun yang menjadi perdebatan atau *ikhtilaf* Ulama' adalah penentuan batas usia cakap hukum bagi seseorang yang tidak mengalami tanda-tanda jasmani sebagaimana yang disebutkan di atas. (3) persamaan dan perbedaan diantara hukum positif dan hukum Islam terkait batas usia cakap hukum, diantara persamaan-persamaannya adalah tujuan hukumnya, konsep untuk sama-sama membawa pada ketataan dan kepatuhan, sama-sama dijadikan norma, kedua konsepsi hukum ini juga sama-sama menerapkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habeur*. Perbedaan terletak pada sumber hukumnya, tolak ukur penentuan batas usia cakap hukum, dan tentang ruang lingkup hubungannya.

ABSTRACT

Thesis titled "Comparative Study of Age Limit Competent Legal Perspective Positive Law and Islamic Law (Review of Article 330 of the Civil Code, Article 47 of Law No. 1 of 1974 About Marriage, Article 45 of the Criminal Penal Code On Children, and Article 98 KHI)" was written by Ilma Fitriana, NIM 2822123015, preceptor Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I.

Keywords: Comparison, Age Limit, Proficient Law, Positive Law, Islamic Law.

This research is motivated by the application of the law can not be separated from society. Where the law into joints are vital in regulating social life so that rights between the one and the other can be mutually protected. Law as a bridge to create the life and discipline, in practice the conception. Among the existing legal conception, conception of positive law and Islamic law are two legal forms have an existence more in Indonesia than the conception of law. In the positive law and the rule of Islamic law, both of them have provisions for age-determination criteria can someone burdened by responsibility law, called the legal capacity. With this background, the researchers compared between positive law and the law of Islam to find out the similarities and differences in determining the age limit a person's legal capacity.

The problems of this study are (1) How is the legal age limit ably positive law perspective? (2) How is the age limit legal capacity perspective of Islamic law? (3) What similarities and differences in the age limit ably positive law and legal perspective of Islamic law? As for the aim of this study was to determine the legal age limit capably both from the perspective of positive law and law of Islam and know well the difference equation.

This research is a normative and library research, data source data source is divided into primary and secondary data sources. Data were presented qualitatively, data analysis was also done qualitatively using descriptive analysis revealed from the juridical analysis supported by comparative analysis.

The results showed that (1) the rules of the age limit ably law in positive law has provisions that vary in determining the qualifying age of a person is considered an adult or competent law between legal substances with each other or in other words, the determination of the age limit competent law in positive law do not have a uniform. Then, because the uniformity provision of competent legal age limit may indicate the occurrence of conflicts of law if the provision of competent legal age limit rules in a legal substance ably met by the rule of law of other legal substances. (2) the determination of the age limit of competent law, Islamic law has a provision that is derived from the Qur'an and have achieved *ijma 'Ulama'*, ie a person is said to have competent legal or in terms of fiqh is called puberty when it *ihtilam* for men and menstruation for women. However, the debate or deviation *Ulama* 'is the determination of competent legal age limit for someone who did not have signs of physical as mentioned above. (3) the

similarities and differences between positive law and Islamic law related to legal age limit capable, among the similarities is the purpose of the law, the concept to equally carry on obedience and submission, equally used as a norm. The difference lies in the legal sources, benchmarks determination of competent legal age limit, and about the scope of the relationship.

ملخص

أطروحة بعنوان "دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والإسلامي العمر الحد المختصة منظور قانوني" كتبه علم فطرينا، نيم اثنين وثمانية اثنان، اثنان واحد اثنان ثلاثة صفر واحد خمسة. مؤدب الدكتور كوتبيدين أبيك، الماجستير الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: مقارنة، عمر محمد، القانون يتقن، القانون الوضعي، الشريعة الإسلامية. والدافع وراء ذا البحث من تطبيق القانون لا يمكن فصلها عن المجتمع. أين القانون في مفاصل حيوية في تنظيم الحياة الاجتماعية بحيث الحقوق بين الواحد والآخر يمكن أن تكون محمية بشكل متبادل. القانون كجسر لخلق الحياة والانضباط في ممارسة المفهوم. بين المفهوم القانوني القائم، مفهوم القانون الوضعي والشريعة الإسلامية نوعان من الأشكال القانونية وجود أكثر في إندونيسيا من مفهوم القانون. في القانون الوضعي وسيادة الشريعة الإسلامية، وكلامها لديها أحكام لمعايير سن تقرير يمكن للشخص مثقلة قانون مسؤولية، ودعا الأهلية القانونية. مع هذه الخلفية، وقارن الباحثون بين القانون الوضعي والقانون من الإسلام لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف في تحديد الحد الأدنى للسن الأهلية القانونية للشخص.

مشاكل هذه الدراسة هي (واحد) كيف هي الحد الأدنى للسن القانوني باقتدار منظور القانون الوضعي؟ (اثنان) كيف هي الصفة القانونية الحد الأدنى للسن منظور الشريعة الإسلامية؟ (ثلاثة)

ما هي أوجه الشبه والاختلاف في الحد الأدنى للسن القانوني الوضعي باقتدار وجهة النظر

القانونية للشريعة الإسلامية؟ أما الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الحد الأدنى للسن القانوني

باقتدار سواء من وجهة نظر القانون الوضعي والقانون من الإسلام ونعرف جيدا الفرق المعادلة.

هذا البحث هو البحث المعياري ومكتبة، وينقسم مصدر البيانات مصدر البيانات إلى مصادر

البيانات الأولية والثانوية. وقدمت بيانات نوعيا، كما فعلت تحليل البيانات النوعية باستخدام

التحليل الوصفي كشف عن تحليل قانوني بدعم من التحليل المقارن.

وأظهرت النتائج أن (واحد) قواعد الحد الأدنى للسن باقتدار القانون في القانون الوضعي

والأحكام التي تختلف في تحديد سن المؤهلة لشخص يعتبر راشدا أو القانون المختص بين المواد

القانونية مع بعضها البعض أو بعبارة أخرى، فإن تقرير القانون المختص الحد الأدنى للسن في

القانون الوضعي لم يكن لديك موحدة. ثم، لتوفير توحيد الحد الأدنى للسن القانوني المختص قد

يشير إلى حدوث تنازع القوانين إذا كان توفير قواعد الحد الأدنى للسن القانوني المختصة في مادة

قانونية التقى باقتدار سيادة القانون من مواد قانونية أخرى. الإحتلام تحديد الحد الأدنى للسن

القانون المختص، تطبيق الشريعة الإسلامية حكما مشتق من القرآن وحققت الإجماع العلماء "،

أي يقال للشخص أن يكون المختصة القانونية أو من حيث الفقه يسمى سن البلوغ عندما

(اثنان) للرجال والحيض للنساء. ومع ذلك، فإن النقاش أو انحراف العلماء 'هو تحديد الحد الأدنى

للسن القانوني المختص لشخص لم يكن لديك علامات جسدية على النحو المذكور أعلاه.

(ثلاثة) وجه الشبه والاختلاف بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية المتعلقة الحد الأدنى للسن

القانوني قادر، من بين أوجه التشابه هو الغرض من القانون، ومفهوم للقيام بنفس القدر على الطاعة والخضوع، وتستخدم على قدم المساواة مع قاعدة. لفرق يكمن في المصادر القانونية ومقاييس تحديد الحد الأدنى للسن القانوني المختص، وحول مدى العلاقة.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Biodata Penulis

Lampiran 3 : Lembar Catatan Revisi Proposal Skripsi